

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bayongbong Kabupaten Garut

Fingki Fitriani¹, Ikeu Hikmawati^{2*}

^{1,2} STISIP Samudera Indonesia Selatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2024

Revised May 05, 2024

Accepted May 10 2024

Available online May 17, 2024

Keywords

bina manusia, bina usaha, bina lingkungan,
bina kelembagaan

Keywords:

human development, business development,
environmental development, institutional
development



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereduksi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Dalam pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dimana pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara interaktif. Pemberdayaan masyarakat di Desa Bayongbong Kabupaten Garut yang dilakukan pemerintah desa dilakukan melalui kegiatan bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan, namun didalam pemberdayaan masyarakat tersebut masih terdapat berbagai hambatan diantaranya sosialisasi yang belum maksimal, pola pikir masyarakat yang susah menerima begitu saja inovasi, gagasan dan pengetahuan baru, terbatasnya anggaran dan adanya beberapa peraturan pemerintah yang dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan, sehingga diperlukan peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dioptimalkan, aparat pemerintah desa agar meningkatkan kerjasama yang baik dan membina hubungan yang

harmonis baik dengan lembaga masyarakat maupun dengan masyarakat, perlu diperhatikannya kendala-kendala yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dijadikan acuan dalam program berikutnya.

ABSTRACT

This empowerment aims to increase the role of village government in improving community welfare and reducing inhibiting factors. This research uses qualitative methods in the form of descriptive research. The selection of informants was carried out purposively, where data was collected using interviews, observation and documentation studies. Data is collected from various sources until sufficient data is obtained. The data obtained is then analyzed interactively. Community empowerment in Bayongbong Village, Garut Regency, which is carried out by the village government, is carried out through human development, business development, environmental development and institutional development activities, however, in community empowerment there are still various obstacles, including socialization that has not been maximized, a community mindset that finds it difficult to take innovation for granted. , new ideas and knowledge, limited budgets and the existence of several government regulations which are considered to hinder community empowerment because they are not in accordance with regional needs and potential, so it is necessary to increase and strengthen the government's role in community empowerment which must be further optimized, village government officials to increase cooperation well and fostering harmonious relationships both with community institutions and with the community, it is necessary to pay attention to the obstacles that hinder the community empowerment process so that they can be used as a reference in the next program.

PENDAHULUAN

Desa Bayongbong merupakan salah satu desa di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. desa ini termasuk desa berkembang tetapi potensial menjadi desa maju. Desa Bayongbong memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Secara geografis Desa Bayongbong memiliki potensi cukup strategis di bidang pertanian sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani tetapi mayoritas kondisi masyarakat petani tersebut merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi karena petani yang memiliki lahan sebanyak 426 orang sedangkan petani yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 721 orang.

Melihat besarnya potensi Desa Bayongbong untuk berkembang sangat disayangkan jika melihat income per kapita masyarakat yang masih rendah berkisar ± 512.330/bulan. Selain itu melihat rekap

*Corresponding author

Email: ikeuhikmawati68@gmail.com

kesejahteraan masyarakat dari 2102 KK yang ada di Desa Bayongbong, masih terdapat rumah tangga miskin sebanyak 477 KK dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera 1 dan sebagian besar mereka berprofesi sebagai buruh tani (Profil Desa Bayongbong, 2024).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Desa Bayongbong yang terdiri dari kepala desa beserta perangkatnya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Bayongbong pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Bayongbong sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan di Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dimana salah satu tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Desa diwajibkan lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan otonomi desa yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bayongbong mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan di Desa Bayongbong berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Desa Bayongbong. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bayongbong dilakukan dengan membagi tugas kepada perangkat desa dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat desa dimana seluruh tugas pemberdayaan tersebut di koordinasikan oleh Kepala Desa.

Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut pemerintah Desa Bayongbong berperan sebagai fasilitator yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, pelayanan atau rekomendasi, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk melaksanakan fungsi lembaga masyarakat tersebut agar setiap program pemberdayaan yang dijalkannya dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

Dalam pemberdayaan masyarakat petani yang ada di Desa Bayongbong dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok tani yang kemudian di bina oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Garut dimana peningkatan kapasitas petani dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian dan bantuan asuransi padi selain itu juga dilakukan kerjasama dengan pengusaha bibit dan pupuk.

Dalam pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian mendapatkan pinjaman dana bergulir berupa dana Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diserahkan terimakan kepada kelompok masyarakat di bawah pembinaan Kaur Kesra Desa Bayongbong.

Sedangkan dalam pembinaan keagamaan dilakukan dengan pembentukan pengurus di setiap masjid yang ada sehingga pengajian rutin bisa dikontrol serta adanya kursus dai di bawah bimbingan Departemen Agama.

Dalam pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti seperti Gapoktan, kelompok simpan pinjam, majelis taklim dilakukan dengan pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan buku petunjuk selain itu pembinaan juga dilakukan pada pemerintah desa sendiri yang dilakukan dalam bentuk Jumat ibadah. Sehingga dari keseluruhan program pemberdayaan di Desa Bayongbong berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Desa Bayongbong.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut ditemukan beberapa kendala sehingga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal diantaranya:

1. Sosialisasi yang diadakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, pengusaha bibit dan pengusaha pupuk belum maksimal terlihat dari sosialisasi pertanian yang diadakan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat petani padahal petani merupakan mata pencaharian terbanyak masyarakat Desa Bayongbong.
2. Adanya pola pikir masyarakat yang susah menerima begitu saja inovasi, gagasan dan pengetahuan baru yang diberikan sehingga kecenderungan sosialisasi yang diadakan tidak memberikan dampak yang signifikan.
3. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program pemberian modal bagi kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok masyarakat lainnya sehingga belum semua masyarakat yang wajib dan berhak mendapatkan bantuannya.

4. Adanya beberapa peraturan pemerintah yang dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan di Desa Bayongbong, misal pengangkatan kepala dusun yang harus memenuhi persyaratan administrasi sehingga terkadang tokoh kharismatik yang dimiliki dan mampu di dengar oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan administrasi didalam pengangkatan menjadi kepala dusun sehingga yang terjadi program pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat dan kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya .

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan partisipatif yang mampu memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah desa untuk memberikan motivasi dan dorongan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas kemampuannya di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan bentuknya menggunakan penelitian deskriptif yaitu membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikannya.

Peneliti bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bayongbong Kabupaten Garut dalam rangka mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Sehingga dapat dikumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

Sumber data terdiri dari dua jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive dan data sekunder dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak oleh Desa Bayongbong. Analisis data digunakan *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, proses datanya mencakup *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (Penyajian data) dan *Conclusion drawing / verification* (Pengarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Bayongbong dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menjalin hubungan dengan lembaga masyarakat yang ada serta memberikan motivasi bagi mereka agar setiap program yang dijalankan itu dapat menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Di Desa Bayongbong, setiap bantuan yang masuk selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dalam mengambil suatu kebijakan, pemerintah desan selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta masyarakat untuk menerima setiap saran dan masukan mereka tidak hanya di forum Musrenbang tapi juga digunakan forum non formal seperti momen gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bayongbong dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut.

Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.

Upaya pemerintah Desa Bayongbong dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah desa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Kelompok tani di Desa Bayongbong terdapat 20 kelompok tani dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 25 anggota. Setiap kelompok mempunyai ketua kelompok yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan kelompoknya. Peningkatan kapasitas petani dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dibidang pertanian kepada warga dan kelompok tani setiap kali musim tanam. Penyuluhannya diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut, jadi penyuluh dihadirkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan terutama untuk pengelolaan agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti pola tanam, pengolahan lahan, pencegahan penyakit, pengendalian hama, sampai

teknik bertani secara holtikultura. Tidak hanya dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut biasanya juga sosialisasi juga diadakan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pengusaha bibit, dan pupuk.

Bina Usaha

Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.

Di Desa Bayongbong bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil, dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta adanya pula asuransi padi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (KSP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Dalam pemberdayaan perempuan melalui pinjaman modal terdapat empat kelompok simpan pinjam dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 25 anggota. Kelompok simpan pinjam di Desa Bayongbong meliputi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Melati, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Mawar, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Tulip dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Angrek. Sebelum mendaftar menjadi anggota kelompok ada tanggung rente atau komitmen dalam setiap kelompok yang harus dipegang teguh agar pengembalian modal berjalan dengan baik.

Bina Lingkungan

Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah Desa Bayongbong menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Desa Bayongbong bisa dikatakan desa swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membangun suasana dan iklim yang kondusif masyarakat yang dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selain melalui gotong royong pembinaan lingkungan sosial juga dilakukan dengan pembinaan keagamaan, agama diyakini menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Pembinaan keagamaan di Desa Bayongbong diwujudkan dengan membentuk pengurus masjid di setiap masjid yang ada sehingga kegiatan pengajian rutin bisa dikontrol, selain itu diberikan pula kursus untuk da'i, pendataan untuk penceramah yang ada dan tunjangan imam dusun dan imam rawatib untuk memotivasi mereka melanjutkan syiar agama.

Bina Kelembagaan

Di Desa Bayongbong pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah: pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan memberikan buku petunjuk.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pembina yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kemudian tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bayongbong yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah desa dalam mendukung pembangunan. Selain faktor pendukung jelas ada faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan.

SIMPULAN

Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

Bina Manusia

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sosialisasi didominasi dibidang pertanian kepada warga dan kelompok tani setiap kali musim tanam. Penyuluhannya diberikan oleh Dinas Pertanian, dari pengusaha bibit dan pupuk agar nilai usaha petani semakin meningkat seperti sosialisasi pola tanam, sosialisasi PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), pengolahan lahan, pencegahan penyakit, pengendalian hama, sampai teknik bertani secara Holtikultura.

Bina Usaha

Pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia.

Bina Lingkungan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah desa menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong-royong. Selain itu dalam bina lingkungan juga diterapkan dengan pembinaan keagamaan melalui pembentukan pengurus masjid dan pengajian rutin, pemberian insentif imam dusun dan imam rawatib, serta pembinaan kelompok majelis taklim.

Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut. Selain membina lembaga masyarakat dilakukan pula bina aparat dengan jumat ibadah.

Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan sedangkan faktor penghambat peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat

Sehingga direkomendasikan agar peningkatan dan penguatan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dioptimalkan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa berjalan sesuai prakarsa masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat. Aparat pemerintah desa agar meningkatkan kerjasama yang baik dan membina hubungan yang harmonis baik dengan lembaga masyarakat maupun dengan masyarakat dengan mengacu pada konsep keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan. Perlu diperhatikannya kendala-kendala yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dijadikan acuan dalam program berikutnya.

REFERENSI

- Abdulsani. 2014. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adimihardja. 2009. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: LP3IS.
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Yogyakarta: Averroes Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2006. Jakarta: Gramedia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Koentjaraningrat. 2001. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Surabaya: Aksara Baru.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2013. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siswanti. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sugondo. 2010. *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sunyoto, Usman. 2008. *Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'e, Inu Kencana. 2009. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2008. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo J. 2014. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.